

OMBUDSMAN RI RANCANG PENGAWASAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kamis, 04 November 2021 - Nurul Istiamuji

Bengkulu - Ombudsman RI merancang perluasan fungsi pengawasan pada proses perencanaan dan penganggaran. Hal ini disampaikan oleh Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika saat bertemu dengan kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Bengkulu Isnan Fajri di Kantor Bappeda Bengkulu pada Rabu (3/11/2021). Pertemuan juga dihadiri secara daring oleh Koordinator Bidang Pemantauan Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Andi Setyo Pambudi.

"Perluasan pengawasan ini sekaligus menegaskan posisi Ombudsman di pemerintahan, mengawasi pelayanan publik dari hulu ke hilir. Karena APBN dan APBD memiliki muara di pelayanan publik," papar Yeka.

Yeka kembali menyampaikan keinginan untuk menampilkan wajah Ombudsman sebagai *Magistrature of Influence* dengan melakukan pendampingan untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik.

"Ombudsman akan segera mengadakan rapat kerja bersama 5 perwakilan sebagai *pilot project* untuk menindaklanjuti rencana ini, untuk menentukan di mana posisi Ombudsman sebagai pengawas perencanaan," ujar Yeka.

Isnan Fajri mengamini hulu pelayanan publik adalah Bappeda. "Kami sedang membangun aplikasi SIPP BANG (Sistem Perencanaan Partisipatif Pembangunan) untuk mendorong partisipasi masyarakat. Tidak bisa hanya andalkan musrenbang," ujarnya.

Sementara itu, Andi Setyo menyampaikan bahwa tugas salah satu Ombudsman RI adalah mencegah maladministrasi. "Perlu kolaborasi lebih optimal antara Ombudsman dan Bappeda untuk memastikan agar usulan masyarakat yang dimulai dari tingkat desa tetap sesuai hingga proses musrenbang di tingkat nasional. Harapannya, target pembangunan selaras dengan kualitas pelayanan publik yg berdampak pada konsekuensi anggaran," pungkasnya. (NI)